

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diatas terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu. Setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari putusan nomor 290/Pid.B/2013/PN.BKL yang sudah disempurnakan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dinilai sudah benar dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara di tingkat banding. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah tepat dalam merumuskan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut.

Mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan, karena telah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah disempurnakan yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan. Memperhatikan pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat 1 KUHP, UU No 08 tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan No. 02/Pid/2014/PT.BKL yang amarnya adalah menerima permohonan banding dari penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal

sidang terbuka untuk umum, kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu diterima oleh pemohon kasasi setelah pemohon kasasi meminta sebagaimana ketentuan pasal 226 ayat 2 KUHAP melalui kuasa hukum secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2014 meminta kepada pihak pengadilan maka pada tanggal 28 Februari 2014 salinan putusan baru diberikan kepada pemohon kasasi dan pada tanggal 04 Maret 2014 pemohon kasasi telah menyatakan kasasi berdasarkan akta permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2914/PN.BKL. Oleh karenanya permohonan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan, maka secara formil permohonan kasasi ini patut dinyatakan untuk diterima.

2. Bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku, bahwa letak salahnya penerapan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah:
 - a. Bahwa *judex facti* dalam putusan No. 02/Pid/2014/PT.BKL telah menegaskan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL tanggal 03 Desember 2013 telah melanggar pasal 197 ayat 1 huruf f, huruf i, dan huruf k KUHAP sehingga sesuai ketentuan pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum adalah norma yang terang, jelas dan tegas maknanya, sehingga pada norma yang demikian itu tidak diperlukan adanya penafsiran atau fatwa dari pihak manapun juga.

- b. Bahwa mengingat putusan yang dikatakan batal demi hukum artinya putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada maka tindakan *judex facti*¹³ dalam putusan mengadili sendiri memerintahkan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memutus kembali perkara No. 290/Pid.B/2013/PN.BKL menyempurnakan pertimbangan hukum yang belum lengkap serta pencantuman ketentuan pasal 197 ayat 1 yang dilalaikan adalah cacat hukum.
- c. Bahwa dikatakan cacat hukum karena suatu putusan yang sudah batal demi hukum maka putusan tersebut dianggap tidak ada sehingga penyempurnaan sebagaimana *judex facti* perlu dipertanyakan karena kalau sudah dibatalkan maka putusan yang mana yang disempurnakan?

Atas alasan-alasan kasasi dari pemohon kasasi I/penuntut umum dan pemohon kasasi II/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perintah Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki putusan di tingkat Pengadilan Negeri telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, selanjutnya atas putusan tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu telah pula menguatkannya dengan demikian tidak beralasan untuk mempertimbangkan permohonan kasasi

¹³ Judex Facti dalam hukum adalah majelis hakim di tingkat pertama yang wajib memeriksa bukti-bukti dari suatu kejadian perkara dan menerapkan aturan serta ketentuan hukum lainnya terhadap fakta-fakta dari perkara tersebut. Dengan kata lain, *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar. (Diakses tanggal 19 Mei 2016 dari <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-judex-facti-dan-judex-juris/>)

